

LAPORAN BULANAN DESEMBER 2025



ANGGOTA BPP PROVINSI PAPUA
KELOMPOK KERJA BPP PROVINSU PAPUA



Ringkasan Eksekutif

Badan Pengarah Percepatan Pembangunan Otonomi Khusus Papua (BP3OKP) Provinsi Papua sepanjang Tahun 2025 melaksanakan berbagai kegiatan strategis dalam empat klaster utama: Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif, dan Papua Polhukam. Kegiatan ini difokuskan pada peninjauan langsung fasilitas pelayanan kesehatan, penancangan pusat studi budaya, publikasi Sekolah Rakyat, fasilitasi peremajaan sawit rakyat, pemberdayaan Mama-Mama Papua dan perlindungan hak Masyarakat adat.

Hasil kegiatan menegaskan adanya kebutuhan mendesak pada sektor kesehatan, terutama peningkatan tenaga medis dan sarana prasarana puskesmas. Pada bidang pendidikan dan budaya, BP3OKP berperan dalam mendorong penguatan Sekolah Rakyat dan pelestarian budaya lokal. Sementara itu, pada aspek ekonomi, langkah nyata dilakukan melalui dukungan program ketahanan pangan, distribusi energi yang merata, serta penguatan kapasitas usaha perempuan Papua. Dalam aspek politik, hukum, dan HAM, pengawasan logistik pemilu berjalan baik sesuai prosedur.

Rekomendasi utama dari seluruh kegiatan menekankan pentingnya sinkronisasi kebijakan pusat dan daerah, peningkatan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat adat, serta kolaborasi lintas sektor. Dengan demikian, BP3OKP menegaskan komitmennya untuk menindaklanjuti setiap rekomendasi, memperkuat koordinasi dengan seluruh pemangku kepentingan, serta mewujudkan pembangunan Papua yang sehat, cerdas, produktif, dan berkeadilan menuju visi Papua Emas 2041.



ALBERTH YOKU, S.Ag
Anggota BPP RI Provinsi Papua



A. Anggota BPP Provinsi Papua

Anggota Badan dan Kelompok Kerja (Pokja) BP3OKP telah melaksanakan kegiatan-kegiatan strategis sebagai berikut :

No	Kegiatan Strategis	Waktu (Tanggal)	Tujuan	Hasil/ Rekomendasi	Gambar (Muat 1 – 2 Gambar)
1.	<i>DKT</i> : PRA kongres Bahasa Daerah Badan Bahasa - KEMNDIKDASMEN	2 Desember 2025	Menghadiri Undangan & memberikan pandangan tentang Peran BP3OKP dalam Pelindungan bahasa daerah	Hasil : Kesepakatan untuk Kongres Bahasa Daerah akan dilaksanakan di Papua. Rekomendasi : Memperkuat kerjasama antara Badan Bahasa & BP3OKP dalam mengawal program pelindungan bahasa & sastra	
2.	Peluncuran SIPPP : BAPPENAS	16 des 2025	Menghadiri Undangan & memberikan pandangan tentang pentingnya tata Kelola pemerintahan yang baik dalam menjalankan RAPPP	Hasil : Terdokumentasi Rekomendasi : Mendorong pemda untuk segera mengimplementasikan RAPPP & SIPPP	



3.	RAKOR : KAJATI – KPK – BP3OKP	11DES 2025	Menghadiri undangan dan menjadi narasumber	Hasil : Memberikan Materi tentang peran koordinatif BP3OKP dalam melakukan pengawasan tata Kelola keuangan dalam bersinergi dengan KPK & KAJATI. Rekomendasi : Perkuat Koordinasi Lintas sektor Pengawasan Penggunaan dana Otsus dengan PKS	
----	----------------------------------	------------	--	---	--



B. Kelompok Kerja
Papua Produktif

No	Kegiatan Strategis	Waktu (Tanggal)	Tujuan	Hasil / Rekomendasi	Gambar (Muat 1 – 2 Gambar)
1.	Menghadiri Undangan dan menyampaikan materi ttg TUSI BP3OKP pada kegiatan dari BAPERIDA Prov. Papua pada Forum Konsultasi Publik Rancangan awal RPJMD Prov. Papua 2025/2026.	09.00 WIT – Selesai (16 Desember 2025)	Untuk mendapat masukan dari berbagai elemen : 1. Tokoh masyarakat. 2. Akademisi. 3. MRP 4. Tokoh Agama 5. OPD Kabupaten dan kota.	Penandatanganan bersama Dokumen penyusunan RPJMD Thn 2025/2026. Rekomendasi : Hasil penandatanganan bersama Dokumen Penyusunan RPJMD Tahun 2025–2026 menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Papua untuk memberikan dukungan kebijakan dan penganggaran yang memadai terhadap program – program yang akan dijalankan	 



2.	Diskusi bersama Anggota Komosis III DPRK Biak Numfor terkait Petunjuk Pengelolaan Dana Otsus Khusus	Jam 11.00 – 14.00 WIT (18 Desember 2025) GKN Lantai 5 Jln. Ahmad Yani. No.3 Kota Jayapura.	Petunjuk Pengelolaan Dana Otonomi Khusus Papua	Rapat Dengar Pendapat BP3OKP dengan DPR/DPRK Kab. Biak. Penyampaian Materi ttg Tata Kelolah Dana Otsus. Rekomendasi : Program dan kegiatan yang didanai melalui Dana Otsus perlu disesuaikan dengan petunjuk teknis dan prioritas yang telah ditetapkan, agar tepat sasaran dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP).	 
----	---	--	--	--	---



Kelompok Kerja
Papua Sehat

No	Kegiatan Strategis	Waktu (Tanggal)	Tujuan	Hasil	Gambar (Muat 1 – 2 Gambar)
1.	Forum Konsultasi RPJMD 2025 – 2029	16 Desember 2025 Hotel Aston Jayapura	Menghimpun masukan dan saran dari berbagai elemen pemangku kepentingan serta menyepakati Dokumen Penyusunan RPJMD Tahun 2025–2026 melalui penandatanganan bersama.	Diperoleh masukan dan saran dari berbagai elemen, yaitu tokoh masyarakat, akademisi, MRP, tokoh agama, serta OPD kabupaten dan kota, yang kemudian dirumuskan dan disepakati melalui penandatanganan bersama Dokumen Penyusunan RPJMD Tahun 2025–2026. Rekomendasi: Dokumen Penyusunan RPJMD Tahun 2025–2026 yang telah ditandatangani bersama agar dijadikan dasar bagi Pemerintah Provinsi Papua dalam memberikan dukungan kebijakan dan penganggaran yang memadai terhadap program-program yang akan dilaksanakan.	



Kelompok Kerja
Papua Cerdas

No	Kegiatan Strategis	Waktu (Tanggal)	Tujuan	Hasil / Rekomendasi	Gambar (Muat 1 – 2 Gambar)
1.	Diskusi Kelompok Terumpun Pra-Kongres Bahasa Daerah	(2 s.d. 5 Desember 2025)	Mendampingi Anggota BPP dalam diskusi Kelompok Terumpun Pra-Kongres Bahasa Daerah.	Kesepakatan untuk Kongres Bahasa Daerah akan dilaksanakan di Papua. Rekomendasi : Memperkuat kerjasama antara Badan Bahasa & BP3OKP dalam mengawal program perlindungan bahasa & sastra	
2.	Sosialisasi Peraturan Walikota No 102 tahun 2025 Tentang Penerapan Pembelajaran Bahasa Ibu Melalui Kurikulum Muatan local Tahun 2025	09.00 WIT – Selesai (8 Desember 2025)	Menghadiri undangan dan memberikan sambutan	memberikan apresiasi kepada pemda kota Jayapura Rekomendasi : Mendorong agar diterbitkan peraturan wali kota lainnya untuk melindungi kebudayaan Port Numbay	



3.	Forum Konsultasi RPJMD 2025 – 2026	09.00 WIT – Selesai (16 Desember 2025)	Untuk mendapat masukan dari berbagai elemen : 1. Tokoh masyarakat. 2. Akademisi. 3. MRP 4. Tokoh Agama OPD Kabupaten dan kota.	Penandatanganan bersama Dokumen penyusunan RPJMD Thn 2025/2026. Rekomendasi : Hasil penandatanganan bersama Dokumen Penyusunan RPJMD Tahun 2025–2026 menjadi dasar bagi Pemerintah Provinsi Papua untuk memberikan dukungan kebijakan dan penganggaran yang memadai terhadap program – program yang akan dijalankan	
4.	Pra-Rapar Koordinasi Teknis (Pra-Rakortek) Perlindungan Bahasa dan Sastra Daerah BP3OKP	15.00WIT – Selesai (18 s.d. 20 Desember 2025)	Mempersiapkan bahan pokok dan Langkah strategis yang akan di rekomendasikan pada rakortek yang akan dilaksanakan.	Berita acara & PKS antara Badan Bahasa – BP3OKP Rekomendasi: Memberikan informasi terpadu pada pemda agar dalam Rakortek bisa menyiapkan program unggulan pelindungan Bahasa & sastra	



Kelompok Kerja
Papua Polhukam

No	Kegiatan Strategis	Waktu (Tanggal)	Tujuan	Hasil	Gambar (Muat 1 – 2 Gambar)
1.	Forum Konsultasi RPJMD 2025 – 2029	16 Desember 2025 Hotel Aston Jayapura	• Menghimpun masukan dan saran konstruktif dari berbagai pemangku kepentingan (stakeholders), termasuk tokoh adat, agama, perempuan, dan akademisi, untuk menyempurnakan rancangan awal RPJMD. • Memastikan kebijakan pembangunan selama lima tahun ke depan sesuai dengan kebutuhan nyata masyarakat di seluruh wilayah Papua. • Menyelaraskan visi, misi, dan program unggulan Kepala Daerah terpilih dengan dokumen perencanaan tingkat nasional, seperti Rencana Induk Percepatan	Hasil Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal RPJMD 2025–2029 Provinsi Papua yang puncaknya dilaksanakan pada pertengahan Desember 2025 menetapkan komitmen untuk menghadirkan perencanaan yang transparan, inklusif, dan berbasis bukti 1. Visi Utama: Papua Sehat, Cerdas, dan Produktif Forum menyepakati visi strategis yang diselaraskan dengan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP) 2025–2029. Fokus utama meliputi: Papua Sehat: Peningkatan kualitas layanan kesehatan dasar yang	 



			Pembangunan Papua (RIPPP) dan RPJMN 2025–2029. • Menjamin sinkronisasi program antar-Organisasi Perangkat Daerah (OPD) untuk menghindari tumpang tindih	menjangkau daerah terpencil. Papua Cerdas: Penguatan literasi dan akses pendidikan bagi Orang Asli Papua (OAP) guna meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia. • Dalam Forum Konsultasi RPJMD 2025–2029 Provinsi Papua, Pokja Politik, Hukum, dan Keamanan (Polhukam) Badan Pengarah Papua (BPP) memberikan rekomendasi strategis guna memastikan stabilitas daerah sebagai fondasi pembangunan Papua • Produktif: Pemberdayaan ekonomi berbasis kearifan lokal untuk menciptakan kemandirian ekonomi masyarakat. • Penguatan Tata Kelola Penyelenggaraan Pemerintahan • Stabilitas Keamanan dan Perlindungan Hak Asasi	
--	--	--	--	---	--



				• Pencegahan Korupsi dan Penegakan Hukum Rekomendasi : • Penguatan Tata Kelola Pemerintahan dan Otonomi Khusus Sinkronisasi Perencanaan: Mendorong agar RPJMD secara eksplisit menyelaraskan program daerah dengan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua (RIPPP) dan program nasional, memastikan tidak ada tumpang tindih program dan memperkuat efektivitas pembangunan. • Peningkatan Literasi Regulasi: Merekomendasikan program peningkatan kapasitas dan literasi regulasi di Organisasi Perangkat Daerah (OPD) agar perencanaan dan pelaksanaan program Otonomi Khusus (Otsus) berjalan sesuai	
--	--	--	--	---	--



				koridor hukum yang berlaku. • Optimalisasi Koordinasi Lintas Instansi: Menekankan pentingnya mekanisme koordinasi yang efektif antara pemerintah provinsi, kabupaten/kota, dan instansi vertikal (TNI/Polri, Kemenko Polhukam) untuk menjamin stabilitas dan keamanan terintegrasi dalam pembangunan.	
2.	Kegiatan Kejaksaan Agung RI, KPK, KEJATI PAPUA dan BPP		• Mendorong Pemda lebih terbuka dalam pengelolaan anggaran agar pembangunan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. • Melakukan pendampingan langsung di daerah • Menyelenggarakan sosialisasi pencegahan korupsi hingga ke tingkat	• Penyelarasan RAPPP 2025 – 2029 Merekomendasikan sinkronisasi penuh antara program kerja daerah dengan <u>Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Papua (RAPPP)</u> yang menekankan pada hasil nyata di lapangan • Optimalisasi Peran BP3OKP	



			pemerintahan kampung (Dana Desa) guna meningkatkan pemahaman pertanggungjawaban dana public • Memastikan penyaluran Dana Otsus 2026 tepat sasaran melalui mekanisme pelabelan (<i>tagging</i>) anggaran agar mudah diawasi • Perlu dilakukan MoU KPK, Kejaksaan Agung RI, Kejaksaan Tinggi Papua, Badan Pemeriksa Keuangan dan Inspektorat (APH) bersama BP3OKP dalam Pengawasan Penggunaan Dana Otsus Tahun 2026	untuk Mendorong penegakan regulasi terhadap pemerintah daerah yang belum maksimal menjalankan fungsi koordinasi dengan BPP, serta penguatan tim IT untuk transparansi data Pembangunan • Mendorong pembentukan forum komunikasi rutin antara pemerintah pusat, daerah, dan tokoh adat untuk memetakan serta meredam potensi konflik terkait sengketa lahan atau batas wilayah DOB • Perlindungan Hak Politik dan Hukum Orang Asli Papua (OAP) • Penguatan Majelis Rakyat Papua (MRP) agar MRP lebih dilibatkan dalam penyusunan Peraturan Daerah Khusus (Perdasus) yang menyangkut hak-hak dasar masyarakat adat.	 
--	--	--	--	--	--



				• Sinergi Penegakan Hukum untuk melakukan kerja sama berkelanjutan antara BPP, Kejati Papua, dan KPK dalam pengawasan preventif terhadap penggunaan anggaran guna mencegah korupsi sistemik. Rekomendasi : 1. Mendorong pembentukan tim IT bersama untuk <i>tagging</i> dan pelabelan dana Otsus agar mempermudah pelacakan (<i>tracking</i>) anggaran oleh aparat penegak hukum (KPK & Kejaksaan). 2. Menginisiasi program pendampingan hukum dan sosialisasi mitigasi risiko korupsi pada proyek-proyek strategis daerah guna menghindari praktik pemerasan atau penyalahgunaan wewenang.	
--	--	--	--	--	--



				3. Membangun sistem penyelesaian perkara tindak pidana khusus (seperti korupsi dan TPPU) yang terpadu antara BP3OKP sebagai pengawas pembangunan dengan instansi vertikal (KPK/Kejaksaan). 4. Mewajibkan penyusunan Laporan Pertanggungjawaban (LPJ) secara bertahap dan transparan bagi setiap OPD yang mengelola dana Otsus, sebagai bahan evaluasi berkala bagi BP3OKP dan instansi penegak hukum	
3.	Sosialisasi Pengadministrasian dan pendaftaran Tanah Ulayat	Rabu, 19 November 2025 Bertempat di kantor Gubernur Provinsi Papua.	1. Memberikan kepastian hukum serta perlindungan terhadap hak-hak masyarakat adat atas tanah ulayat mereka 2. Mempercepat proses inventarisasi dan identifikasi tanah ulayat agar dapat	1. Kegiatan sosialisasi berhasil meningkatkan pemahaman masyarakat hukum adat, lembaga adat, dan pemangku kepentingan terkait mengenai pentingnya pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat sebagai bentuk pengakuan dan	



			terdaftar secara resmi dalam sistem administrasi pertanahan nasional. 3. Adanya peraturan terbaru mengenai pendaftaran tanah ulayat kesatuan masyarakat hukum adat untuk mencegah konflik agraria di masa depan	perlindungan hukum oleh negara. 2. Sosialisasi menegaskan bahwa pendaftaran tanah ulayat bukan merupakan pemberian hak baru oleh negara, melainkan bentuk pengakuan terhadap hak kolektif masyarakat hukum adat yang telah ada secara turun-temurun. 3. Keterlibatan Kementerian ATR/BPN RI, BP3OKP RI, akademisi, lembaga adat, dan masyarakat hukum adat menunjukkan bahwa pengadministrasian tanah ulayat membutuhkan sinergi lintas sektor agar dapat dilaksanakan secara adil, partisipatif, dan berkelanjutan. 4. Ditemukan sejumlah kendala utama, antara lain:	 
--	--	--	---	--	--



				▪ Belum seragamnya pengakuan masyarakat hukum adat di daerah ▪ Lemahnya dokumentasi wilayah adat ▪ Tumpang tindih klaim lahan dengan perizinan negara atau pihak swasta ▪ Keterbatasan kapasitas teknis dan administratif di tingkat lokal 5. Akademisi berperan penting dalam memberikan landasan ilmiah dan kajian hukum, sementara lembaga adat berfungsi sebagai sumber legitimasi sosial dan kultural dalam penetapan wilayah ulayat. 6. Pencatatan dan pemetaan tanah ulayat dipahami sebagai instrumen strategis untuk mencegah konflik agraria,	
--	--	--	--	---	--



				memperkuat kepastian hukum, serta melindungi wilayah adat dari penguasaan yang tidak sah. 7. Kegiatan sosialisasi menghasilkan komitmen bersama untuk mendorong percepatan pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat melalui pendampingan, pemetaan partisipatif, dan penguatan regulasi di tingkat daerah. Rekomendasi : 1. BP3OKP mendorong percepatan sosialisasi pengadministrasian dan pendaftaran tanah ulayat melalui sinergi dengan lembaga adat seperti MRP serta program prioritas otonomi khusus Papua.	
--	--	--	--	--	--



				Rekomendasi utama mencakup koordinasi lintas provinsi untuk pemetaan tanah adat dan kolaborasi dengan Kementerian ATR/BPN. 2. BP3OKP berfungsi sebagai badan pengarah Otsus yang mengawal partisipasi masyarakat adat dalam kebijakan tanah, termasuk pencegahan konflik agraria. Rekomendasi spesifik meliputi pelibatan kepala suku dan ondoafi dalam pendataan database ATR/BPN. Ini selaras dengan proposal kongres pemuda adat Papua yang Anda bahas sebelumnya, menekankan dialog kebangsaan atas tanah ulayat.	
--	--	--	--	--	--



				3. BP3OKP menekankan tiga konsep percepatan pembangunan, termasuk penandatanganan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan (RAPP) 2025-2030 yang mencakup pengelolaan tanah ulayat.mendorong penguatan keterlibatan MRP 4. BP3OKP dapat melakukan fungsi pengawasan atas hak adat, termasuk pendaftaran tanah di wilayah seperti Jayapura. Sesuai Dialog dengan Wakil Presiden telah menghasilkan komitmen untuk perekrutan Pokja khusus pembangunan berbasis adat	
--	--	--	--	---	--



				5. BP3OKP mendorong mekanisme penyelesaian tumpang tindih klaim tanah ulayat melalui mediasi berbasis adat yang melibatkan kepala suku, MRP, dan Kementerian ATR/BPN untuk menghindari konflik agraria di Papua. Proses ini menekankan verifikasi batas fisik secara partisipatif sebelum sertifikasi, sesuai Permen ATR No. 14/2024. 6. Langkah Utama, BP3OKP mengusulkan tahap awal pengkajian yuridis-faktual klaim tumpang tindih oleh Pokja Adat, diikuti dialog multipartai dengan pemerintah daerah. Koordinasi	
--	--	--	--	--	--



				lintas provinsi melalui RAPP 2025-2030 memastikan pemetaan GIS untuk batas ulayat yang akurat. Pelibatan masyarakat adat seperti ondoafi wajib untuk validasi klaim historis 7. Sebagai badan pengarah Otsus, BP3OKP mengawasi pencegahan mafia tanah via sinergi BPN dan pemda, termasuk patok batas seperti di Skouw Yambe.	
4.	Pemusnahan Barang yang Menjadi Milik Negara Hasil Penindakan Cukai Tahun 2025	18 Des 2025 Halaman Kantor Gedung Keuangan Negara Jayapura	1. Memperkuat sinergi Otsus dengan penegakan hukum untuk melindungi masyarakat/ OAP dari barang ilegal. Kegiatan ini menegaskan komitmen BP3OKP dalam pengawasan dana otonomi	1. Sinergi BP3OKP dengan instansi seperti Kejati atau Ombudsman sudah dilakukan via audiensi dan MoU hukum untuk pengawasan dana Otsus, yang bisa diperluas ke isu barang ilegal tanpa MoU khusus Bea	



			husus guna cegah kerugian negara dan dampak kesehatan dari rokok serta minuman ilegal. 2. Memperkuat kolaborasi lintas instansi antara BP3OKP, Bea Cukai, dan Forkopimda untuk amankan hak negara atas barang kena cukai ilegal senilai miliaran rupiah, sesuai Surat Persetujuan Menteri Keuangan. Mengedukasi masyarakat adat Jayapura tentang bahaya peredaran BKC ilegal yang merugikan ekonomi Otsus dan kesehatan generasi muda Papua.	Cukai. Koordinasi informal melalui rapat pleno atau FGD lebih efektif daripada MoU formal untuk kawal Otsus menuju Papua 2. Emas 2041 3. Dampak bagi Masyarakat. Barang ilegal seperti rokok dan alkohol merugikan masyarakat adat Papua melalui kerugian negara (Rp331 juta di Jayapura 2025) dan dampak kesehatan, sehingga BP3OKP bisa dorong Perda pengawasan lokal tanpa MoU langsung. Rekomendasi : Penguatan Sinergi Pengawasan Lintas Sektoral BP3OKP perlu mendorong kolaborasi yang lebih erat antara Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) dengan aparat penegak hukum daerah (Satpol	 
--	--	--	--	--	--



				PP dan Kepolisian) untuk memperketat pintu masuk barang ilegal di wilayah perbatasan dan pelabuhan tikus. • Mengusulkan integrasi data penindakan ke dalam sistem pemantauan BP3OKP guna mengevaluasi dampak peredaran barang ilegal terhadap ekonomi lokal dan kesehatan masyarakat di Papua. 2. Edukasi dan Literasi Cukai bagi Masyarakat Adat & Pelaku Usaha • BP3OKP dapat memfasilitasi program sosialisasi bersama Bea Cukai mengenai pentingnya cukai legal sebagai sumber pendapatan negara yang nantinya dikembalikan ke daerah melalui Dana Bagi Hasil (DBH) Cukai Hasil Tembakau (CHT) untuk mendanai sektor	
--	--	--	--	---	--



				kesehatan dan kesejahteraan. • Mendorong pemberdayaan UMKM lokal agar memiliki legalitas usaha yang lengkap sehingga tidak terjebak dalam distribusi barang ilegal. 3. Mitigasi Kebocoran Pendapatan Daerah • Merekomendasikan pengetatan pengawasan terhadap peredaran rokok dan miras tanpa pita cukai yang berpotensi mengurangi Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan efektivitas dana Otsus yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur dan SDM Papua. • Memastikan penegakan hukum terhadap pelaku distribusi barang ilegal dilakukan	
--	--	--	--	--	--



				secara tegas dan transparan untuk memberikan efek jera, sejalan dengan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (<i>Good Governance</i>).	
--	--	--	--	---	--



Kesimpulan

Pelaksanaan berbagai kegiatan strategis BP3OKP Provinsi Papua sepanjang bulan Desember 2025 menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung percepatan pembangunan Otonomi Khusus Papua melalui empat klaster utama, yaitu **Papua Sehat, Papua Cerdas, Papua Produktif dan Papua Polhukam**. Masalah tata kelola, akuntabilitas, dan pengawasan penggunaan dana Otsus masih menjadi tantangan utama di hampir semua sektor.

- Koordinasi lintas sektor yang terpadu antara pemerintah pusat, provinsi, kabupaten, dan lembaga terkait.
- Percepatan pembangunan infrastruktur dan fasilitas dasar di bidang kesehatan, pendidikan, dan transportasi, khususnya di wilayah terpencil dan kepulauan.
- Penguatan kapasitas SDM dan institusi lokal melalui pelatihan, pendampingan, dan penyediaan tenaga profesional.
- Integrasi program strategis seperti Papua Cerdas, revitalisasi budaya, dan literasi keuangan, agar sesuai kebutuhan masyarakat asli Papua.
- Tindak lanjut terstruktur melalui MoU, matriks aksi, penetapan PIC, dan timeline percepatan implementasi program

Rangkaian rekomendasi yang dihasilkan menekankan pentingnya **sinkronisasi kebijakan pusatdaerah, peningkatan infrastruktur dasar, pemberdayaan masyarakat adat, serta kolaborasi lintas sektor** untuk memastikan keberlanjutan pembangunan Papua secara inklusif.

Penutup

Demikian laporan hasil kegiatan strategis beserta rekomendasi yang telah disusun oleh Anggota Badan dan Kelompok Kerja (Pokja). Melalui rangkaian koordinasi, kunjungan kerja, serta dialog bersama pemangku kepentingan di berbagai sektor, diperoleh gambaran nyata mengenai kondisi pembangunan dan tantangan yang dihadapi masyarakat, khususnya terkait pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus), pelayanan dasar, serta tata kelola pemerintahan di daerah.

Hasil kegiatan ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan acuan kebijakan bagi Pemerintah Kabupaten, Kota, Pemerintah Provinsi Papua, serta Pemerintah Pusat dalam merumuskan langkah strategis ke depan. Diperlukan komitmen bersama dari seluruh pihak — pemerintah, lembaga keagamaan, aparat keamanan, tokoh adat, dan masyarakat — untuk memastikan setiap program dan kegiatan benar-benar memberikan dampak positif bagi kesejahteraan Orang Asli Papua (OAP).

Melalui pelaksanaan rekomendasi yang telah dirumuskan, diharapkan tercipta tata kelola pembangunan yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan, dengan menitikberatkan pada peningkatan kualitas hidup masyarakat di bidang kesehatan, pendidikan, ekonomi, serta perlindungan hak-hak adat dan kemanusiaan.

Akhirnya, semoga laporan ini dapat menjadi dasar penguatan sinergi lintas sektor dalam mewujudkan Papua yang Sehat, Cerdas, Produktif, dan Adil menuju kesejahteraan Masyarakat Papua.